

ANALISIS PENGUJIAN DAN PEMBAYARAN BERDASARKAN PERINTAH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI BIRO UMUM SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH

Beatrick Rombe¹, Amir Jaya², Sita Y. Sabanda³

beatrickdflow15@gmail.com¹, amirjaya0505@ukipaulus.ac.id², sitasabandar@gmail.com³

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengujian dan Pembayaran Berdasarkan Perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dari primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini melibatkan 5 orang informan. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif proses analisis ini meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Proses pengujian dan Pembayaran berdasarkan Perintah PPK meliputi: Koordinasi yang baik antara PPK, bagian keuangan, pengadaan, dan penyedia barang/jasa akan memperlancar proses pengujian dan pembayaran, serta memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Peran dan tanggung jawab PPK dalam proses pengujian dan Pembayaran berdasarkan Perintah PPK adalah berperan dan bertanggungjawab dalam memastikan bahwa dokumen yang diterima sudah benar-benar sah dan tidak ada yang terlewat, memiliki pemahaman yang baik tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi tagihan, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan dalam dokumen yang diterima. 3) Faktor-faktor yang menghambat proses pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK, diantaranya kelengkapan dokumen yang belum siap saat diajukan, masalah teknis aplikasi keuangan disebabkan keterbatasan jaringan internet, koordinasi antar bagian yang kurang efisien serta kekurangan tenaga ahli khususnya bidang pengujian.

Kata Kunci: Pengujian, Pembayaran, Pembuat Komitmen.

Abstrack

This study to analyze the Testing and Payment Process Based on the Orders of the Commitment Making Officer (PPK) at the General Bureau of SETDA in the Central Papua Province. The research employs a descriptive qualitative approach. The data sources include both primary and secondary data. The data collection methods are observation, interviews with informants, and documentation. The informants in this study involve five individuals. The data analysis method follows the descriptive qualitative analysis approach, which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verifications. The findings of this research indicate that: 1) The testing and payment process based on the Orders of the PPK includes: Good coordination between PPK, the finance division, procurement, and goods/services providers will streamline the testing and payment process, ensuring that each payment transaction is carried out transparently, accountably, and in accordance with applicable regulations. 2) The role and responsibility of the PPK in the testing and payment process based on the Orders of the PPK involve ensuring that the received documents are legitimate and complete, having a good understanding of the required documents for verifying invoices, and possessing the ability to identify potential issues or errors in the documents received. 3) Factors that hinder the testing and payment process based on the Orders of the PPK include incomplete documents submitted by providers, technical issues in financial applications due to limited internet connectivity, inefficient coordination between divisions, and a lack of expertise, especially in the field of testing.

Keywords: Testing, Payment, Commitment Maker.

PENDAHULUAN

Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tengah merupakan unsur staf yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Papua Tengah. SETDA berperan sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif terhadap seluruh pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Seiring dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, SETDA menjadi salah satu struktur kelembagaan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan memastikan sinergi antarlembaga daerah berjalan optimal. SETDA terdiri dari beberapa biro, termasuk Biro Umum, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan lainnya, yang masing-masing memiliki fungsi teknis dan administratif. Salah satu peran penting SETDA, khususnya melalui Biro Umum, adalah mengelola kebutuhan administrasi umum, perencanaan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran yang mendukung operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk pengujian dan pembayaran keuangan daerah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam konteks ini, SETDA menjadi pusat koordinasi dan pengendalian terhadap efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan tata usaha pemerintah provinsi. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangat penting bagi keberhasilan suatu instansi pemerintah, termasuk Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. Salah satu proses penting dalam pengelolaan keuangan adalah pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan keuangan adalah proses pengujian dan pembayaran yang dilakukan berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tagihan yang diajukan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan hukum sebelum pembayaran dilakukan.

Pada Biro Umum Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tengah, proses pengujian dan pembayaran menjadi fokus penting karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran yang tepat, efisien, dan sesuai aturan. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan berbagai tantangan dan hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Penelitian ini dilaksanakan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi umum dan anggaran daerah.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada proses pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK, meliputi verifikasi dokumen, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta pelaksanaan pembayaran anggaran di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini juga menelaah bagaimana prosedur ini dijalankan, kendala yang dihadapi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengujian dalam penelitian ini adalah proses verifikasi dan evaluasi atas tagihan atau permintaan pembayaran yang dilakukan oleh PPK untuk memastikan kesesuaian dengan kontrak dan kelengkapan dokumen. Pembayaran adalah tindak lanjut pencairan dana yang dilakukan setelah pengujian dinyatakan lengkap dan sah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai peraturan.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan kajian peneliti terhadap berbagai sumber, penelitian sebelumnya, topik mengenai pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara spesifik, khususnya dalam konteks Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, belum banyak atau bahkan belum pernah menjadi fokus utama penelitian terdahulu. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung membahas pengadaan barang/jasa secara umum, pengendalian anggaran, maupun peran PPK secara luas tanpa mengulas secara mendalam tahapan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. Kekosongan ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang penting untuk diisi, mengingat pengujian dan pembayaran merupakan tahapan krusial dalam tata kelola keuangan negara, yang erat kaitannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut dan mendalam mengenai proses pengujian dan pembayaran yang dilakukan atas perintah PPK, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik secara akademik maupun praktis, terutama dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah, ditemukan beberapa fenomena menarik. Antara lain, adanya ketidaksesuaian dokumen pendukung yang menyebabkan proses pengujian menjadi tertunda, kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, serta tantangan dalam pemenuhan standar prosedur pengujian dan pembayaran sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini mengindikasikan masih adanya ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan fungsi PPK dan proses administrasi keuangan di biro tersebut.

Penelitian ini penting karena memberikan gambaran tentang efektivitas dan akuntabilitas proses pengujian dan pembayaran di lingkungan pemerintahan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan tata kelola keuangan, mencegah penyimpangan anggaran, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah dalam meningkatkan kualitas dan ketertiban pengujian serta pembayaran anggaran. Dengan perbaikan prosedur dan penguatan pengawasan, diharapkan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengujian dan Pembayaran Berdasarkan Perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dari primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini melibatkan 5 orang informan. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif proses analisis ini meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi terhadap proses pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah menunjukkan beberapa hal penting yang mempengaruhi kelancaran administrasi

keuangan di instansi ini. Observasi mengungkapkan bahwa hubungan yang baik antara PPK, bagian keuangan, bagian pengadaan, dan penyedia barang/jasa menjadi kunci dalam mempercepat proses verifikasi dan pembayaran. Koordinasi yang efektif memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran dilakukan dengan transparansi yang tinggi, sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Hal ini juga membantu mengurangi potensi kesalahan administratif dan meminimalkan terjadinya pemborosan anggaran. PPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diterima telah lengkap, valid, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam memverifikasi tagihan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, termasuk memeriksa kesesuaian antara pekerjaan yang telah dilakukan dengan tagihan yang masuk. PPK tidak hanya harus teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai jenis dokumen yang diperlukan dan bagaimana cara memverifikasi tagihan. Kemampuan PPK dalam mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam dokumen yang diterima dapat mempercepat proses dan mengurangi resiko kesalahan dalam pembayaran. PPK juga harus memastikan bahwa proses verifikasi tidak terganggu oleh masalah teknis atau administrasi yang dapat menunda pembayaran.

Peran PPK sangat penting, proses pengujian dan pembayaran di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat. Salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran proses adalah kelengkapan dokumen yang belum siap atau tidak lengkap saat diajukan. Ketidaklengkapan dokumen ini sering kali memperlambat proses verifikasi dan menunda pembayaran. Penyedia barang/jasa yang terlambat menyerahkan dokumen atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam proses pengujian dan pembayaran. Dokumen yang tidak lengkap harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dapat diproses lebih lanjut, yang tentu saja memerlukan waktu tambahan. Masalah teknis pada sistem aplikasi keuangan juga menjadi faktor penghambat. Observasi menunjukkan bahwa ketidakstabilan jaringan internet atau masalah teknis lainnya pada aplikasi yang digunakan untuk memproses pembayaran sering kali menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam verifikasi dan pembayaran. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar, mengingat banyaknya data yang harus diproses dan diverifikasi dalam waktu yang terbatas. Sistem aplikasi yang tidak dapat menangani volume data yang besar atau yang sering mengalami downtime memaksa PPK dan staf lainnya untuk melakukan pengolahan secara manual atau menunggu hingga sistem kembali normal, yang tentunya memperlambat keseluruhan proses. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antar bagian yang terlibat dalam proses pengujian dan pembayaran. Observasi menunjukkan bahwa apabila koordinasi antar bagian keuangan, pengadaan, dan PPK tidak berjalan dengan baik, maka proses pengujian dan pembayaran bisa terhambat. Misalnya, jika dokumen yang diajukan oleh penyedia barang/jasa tidak langsung diteruskan ke bagian yang berwenang untuk diperiksa atau disetujui, maka proses verifikasi akan tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang tidak efisien dapat memperpanjang waktu proses dan membuat pembayaran menjadi tertunda. Kurangnya tenaga ahli, terutama di bidang pengujian, menjadi salah satu faktor yang menghambat proses. Proses pengujian dokumen yang teliti dan sesuai dengan ketentuan memerlukan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku dan dokumen yang harus diverifikasi. Ketika jumlah tenaga ahli yang terbatas, atau tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam pengujian dokumen, proses verifikasi bisa terhambat,

sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran.

Bedasarkan hasil wawancara dengan kelima informan pada penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa proses pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah menunjukkan bahwa proses tersebut berjalan dengan cukup terstruktur dan melibatkan koordinasi antar berbagai pihak. Koordinasi yang baik antara PPK, bagian keuangan, pengadaan, dan penyedia barang/jasa menjadi faktor utama yang memperlancar proses pengujian dan pembayaran. Dengan adanya koordinasi yang efektif, proses pembayaran dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran dan tanggung jawab PPK sangat vital dalam memastikan kelancaran proses ini. PPK berfungsi untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diterima telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada yang terlewatkan. Selain itu, PPK harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi tagihan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi kesalahan atau potensi masalah dalam dokumen yang diterima. Dengan demikian, PPK tidak hanya berperan dalam pengujian administrasi tetapi juga berfungsi sebagai pengendali terhadap kemungkinan pemborosan anggaran. Faktor yang menghambat kelancaran proses pengujian dan pembayaran ini. Salah satunya adalah ketidaklengkapan dokumen yang sering kali belum siap saat diajukan, yang menyebabkan penundaan dalam proses verifikasi. Selain itu, masalah teknis pada aplikasi keuangan, terutama yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet, sering kali memperlambat pengolahan data dan memperpanjang waktu verifikasi. Koordinasi antar bagian yang kurang efisien juga menjadi hambatan dalam memperlancar proses, karena keterlambatan atau kesalahan dalam penanganan dokumen dapat menghambat alur kerja. Selain itu, kekurangan tenaga ahli, terutama di bidang pengujian dokumen, juga mempengaruhi kelancaran proses ini. Meskipun terdapat beberapa hambatan, proses pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah dapat berjalan dengan lancar apabila koordinasi antar bagian dilakukan dengan baik dan jika masalah teknis dan kekurangan sumber daya manusia dapat diatasi dengan efektif.

Proses pengujian dan Pembayaran berdasarkan Perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.

Proses pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah merupakan tahapan yang krusial dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dimulai dengan penerimaan tagihan dari penyedia barang/jasa, proses ini memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan anggaran yang disetujui. Tagihan yang diterima oleh pihak terkait harus terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya, untuk memastikan bahwa dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan syarat administratif dan teknis yang berlaku. Setelah dokumen tagihan lengkap, tahap berikutnya adalah pemeriksaan oleh PPK. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab untuk memverifikasi kesesuaian tagihan dengan kontrak yang telah disepakati antara pemerintah dan penyedia barang/jasa. Ini mencakup pengecekan terhadap berbagai aspek, seperti jumlah barang/jasa yang diterima, kualitas, dan ketepatan harga yang tercantum dalam kontrak. PPK juga bertanggung jawab memastikan bahwa pengeluaran tersebut tidak melebihi anggaran yang telah disetujui. Jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, PPK kemudian memberikan perintah untuk memproses pembayaran. Setelah menerima perintah dari PPK, proses pengujian dan pembayaran diteruskan ke bagian keuangan. Di sini,

pembayaran dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh PPK. Bendahara pengeluaran dan pejabat terkait di bagian keuangan memeriksa kembali dokumen yang diterima untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam data yang tertera. Proses verifikasi ini sangat penting agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, menghindari kesalahan administratif yang bisa berujung pada ketidakakuratan dalam pencairan dana. Selama proses ini, SPM yang telah disetujui PPK harus diteruskan ke pihak terkait untuk diperiksa kelengkapannya dan dipastikan bahwa tidak ada dokumen yang terlewat. Setelah verifikasi selesai, SPM akan digunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang merupakan instrumen penting dalam proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa. SP2D ini menjadi bukti sah bahwa dana yang telah diperiksa dan disetujui untuk dibayarkan kepada pihak ketiga sudah sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Koordinasi antara bagian keuangan, pengadaan, dan PPK sangat vital dalam proses ini. Setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa proses pengujian dan pembayaran dilakukan dengan benar. Bagian keuangan dan pengadaan harus memastikan bahwa setiap dokumen tagihan yang diterima dari penyedia barang/jasa lengkap dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Tanpa verifikasi yang matang, pengujian dan pembayaran dapat terhambat dan berisiko menimbulkan ketidakakuratan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Tanggung jawab PPK dalam proses pengujian sangat besar, karena mereka adalah pihak yang pertama kali memastikan kesesuaian tagihan dengan ketentuan yang ada. PPK bertugas memverifikasi apakah pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa sudah sesuai dengan kontrak dan apakah biaya yang ditagihkan sudah tepat dan sesuai dengan anggaran yang ada. Hal ini menjadi dasar bagi penerbitan SPM dan SP2D untuk melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa. Pada sisi lain, penyedia barang/jasa juga memiliki peran penting dalam kelancaran proses ini. Penyedia diharuskan menyerahkan tagihan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Keterlambatan dalam pengumpulan dokumen atau ketidaksesuaian dokumen dapat memperlambat seluruh proses pengujian dan pembayaran. Penyedia juga harus memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak agar tidak ada kendala dalam tahap verifikasi oleh PPK. Namun, proses pengujian dan pembayaran seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterlambatan dokumen atau masalah teknis dalam sistem aplikasi keuangan yang digunakan. Sistem aplikasi yang tidak stabil atau kesalahan input data dapat memperlambat proses verifikasi dan pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang andal dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, mulai dari penyedia barang/jasa hingga pihak keuangan dan PPK.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bagian keuangan dan pengadaan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses ini. Apabila jumlah staf terbatas, terutama pada periode-periode sibuk seperti akhir tahun anggaran, proses verifikasi dan pembayaran bisa terhambat. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif dan perencanaan yang matang sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pengujian dan pembayaran. Selain itu, faktor regulasi yang sering berubah juga dapat mempengaruhi proses pengujian dan pembayaran. Perubahan dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah memerlukan penyesuaian yang cepat oleh semua pihak terkait, termasuk PPK, bagian pengadaan, dan bagian keuangan. Keterlambatan dalam memahami atau mengadaptasi regulasi baru dapat menyebabkan keterlambatan dalam

proses verifikasi dan pembayaran, serta risiko terjadinya kesalahan administrasi.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan proses ini, diperlukan sistem pengarsipan yang efisien, komunikasi yang baik antar bagian, serta pelatihan berkala untuk SDM yang terlibat dalam pengujian dan pembayaran. Dengan adanya sistem pengarsipan yang baik, proses pencarian dan verifikasi dokumen bisa lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat tahapan verifikasi dan pembayaran. Peran teknologi informasi juga tidak kalah penting dalam mendukung kelancaran proses ini. Penggunaan aplikasi keuangan yang memadai dapat mempercepat proses input data dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Namun, aplikasi tersebut harus didukung oleh infrastruktur yang baik, seperti koneksi internet yang stabil dan server yang handal, untuk menghindari gangguan teknis yang bisa menghambat proses verifikasi dan pembayaran.

Proses pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah melibatkan berbagai tahapan yang harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Setiap bagian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keakuratan proses ini. Koordinasi yang baik antara PPK, bagian keuangan, pengadaan, dan penyedia barang/jasa akan memperlancar proses pengujian dan pembayaran, serta memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini juga menggambarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dan akurat dalam pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, setiap tahap pengujian dan pembayaran harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, diharapkan proses ini dapat mendukung pengelolaan anggaran daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Peran dan tanggung jawab PPK dalam proses pengujian dan Pembayaran berdasarkan Perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.

Peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah merupakan aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai PPK, tanggung jawab utama adalah memastikan bahwa setiap tagihan yang diterima dari penyedia barang/jasa sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal ini sangat penting untuk mencegah adanya pemborosan anggaran dan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. PPK bertugas memverifikasi bahwa setiap transaksi pembayaran yang diajukan telah memenuhi semua persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan.

Tanggung jawab PPK dalam pengujian tagihan melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian antara pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan dokumen yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa. Proses ini tidak hanya melibatkan verifikasi terhadap jumlah dan kualitas barang atau jasa yang diserahkan, tetapi juga memastikan bahwa harga yang dibayar sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini membantu menjaga agar anggaran yang dialokasikan tidak mengalami pemborosan atau penyalahgunaan. PPK harus memastikan bahwa setiap tagihan yang diajukan sudah benar, baik dari sisi jumlah, spesifikasi, maupun harga, dan bahwa pekerjaan yang dilakukan benar-benar selesai dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai bagian dari proses pengujian, PPK juga memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dokumen yang diterima dari penyedia barang/jasa dan

memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap, sah, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa verifikasi yang tepat dari PPK, dokumen tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut untuk pembayaran. Proses pengujian ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak serta aturan keuangan yang berlaku. Salah satu peran penting lainnya dari PPK adalah memverifikasi bahwa pembayaran yang dilakukan tidak melebihi anggaran yang telah disetujui. Dalam hal ini, PPK bertanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian antara tagihan yang diterima dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek atau kegiatan tersebut. Jika ada ketidaksesuaian antara anggaran dan tagihan, PPK harus segera mengambil langkah untuk memperbaiki dan memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, serta untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana.

Pentingnya peran PPK dalam proses pengujian dan pembayaran juga tercermin dalam langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di luar Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. PPK harus bekerja sama dengan bendahara pengeluaran dan pejabat penandatanganan SPM (PPSPM) untuk memastikan bahwa dokumen yang sudah diverifikasi oleh PPK bisa diproses lebih lanjut dan pembayaran dapat segera dilakukan. PPK harus memastikan bahwa dokumen yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga proses pembayaran dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. PPK juga bertanggung jawab untuk menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM) sebagai tanda bahwa pembayaran dapat dilakukan. Proses penandatanganan SPM ini adalah langkah terakhir sebelum pembayaran dapat diteruskan ke pihak bendahara untuk diproses lebih lanjut. PPK juga harus memastikan bahwa SPM yang ditandatangani sudah mencantumkan informasi yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pembayaran. Dalam proses ini, PPK juga harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengujian dan pembayaran, termasuk penyedia barang/jasa, bagian keuangan, dan pengadaan, memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur dan peraturan yang berlaku. Koordinasi yang efektif antara PPK dan pihak-pihak terkait akan mempercepat proses pengujian dan pembayaran, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau keterlambatan. PPK, sebagai pihak yang memegang peran kunci dalam proses ini, harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur, regulasi, dan tata kelola keuangan yang berlaku.

Penyedia barang/jasa memiliki peran penting dalam proses ini, karena mereka harus menyerahkan dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. PPK harus memverifikasi bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan kontrak, dan hanya setelah itu pembayaran dapat dilakukan. PPK berperan penting dalam memastikan bahwa dokumen yang diterima dari penyedia barang/jasa telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, PPK juga harus memastikan bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan tanpa verifikasi yang jelas. Hal ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. PPK bertanggung jawab untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi kontrak maupun anggaran. PPK juga harus memantau proses pembayaran untuk memastikan bahwa tidak ada tagihan yang terlewat atau dibayar

lebih dari yang seharusnya. Dalam hal ini, PPK berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pengawasan yang ketat oleh PPK membantu memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan anggaran. Proses pengujian dan pembayaran yang baik dan benar sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara PPK dan bagian keuangan. PPK harus memastikan bahwa dokumen yang diterima sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ada sebelum SPM diterbitkan. Bagian keuangan juga harus memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu setelah SPM diterima. Keterlambatan dalam proses ini dapat mengganggu kelancaran pengelolaan anggaran dan merusak hubungan dengan penyedia barang/jasa. Tanggung jawab PPK juga mencakup memastikan bahwa dokumen yang diterima sudah benar-benar sah dan tidak ada yang terlewat. PPK harus memiliki pemahaman yang baik tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi tagihan, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan dalam dokumen yang diterima.

Peran dan tanggung jawab PPK dalam proses pengujian dan pembayaran sangat vital dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Dengan menjalankan tugasnya dengan cermat dan hati-hati, PPK tidak hanya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menghambat proses pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.

Faktor-faktor yang menghambat proses pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah mencakup berbagai aspek yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat kelancaran administrasi keuangan. Salah satu faktor yang paling sering ditemui adalah keterlambatan pengumpulan dokumen dari penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa yang tidak segera menyerahkan dokumen lengkap menyebabkan tertundanya proses verifikasi, yang berujung pada keterlambatan dalam pembayaran. Keterlambatan ini bisa berdampak negatif terhadap hubungan antara pemerintah daerah dengan penyedia barang/jasa, serta dapat mempengaruhi kelancaran penggunaan anggaran. Selain keterlambatan dokumen, masalah teknis dalam sistem aplikasi keuangan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Sistem yang tidak stabil atau bermasalah dalam hal konektivitas internet sering kali menyebabkan proses verifikasi data menjadi lebih lambat. Ketika aplikasi keuangan tidak berfungsi dengan baik, staf keuangan atau PPK terpaksa melakukan proses manual atau menghadapi kendala dalam input data. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kecepatan proses pengujian dan pembayaran, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan atau ketidaksesuaian data yang bisa berakibat fatal bagi kelancaran administrasi keuangan.

Masalah koordinasi antar bagian juga menjadi hambatan yang cukup besar. Keterlambatan dalam komunikasi atau kurangnya koordinasi antar berbagai unit kerja yang terlibat dalam proses pengujian dan pembayaran dapat memperlambat pengambilan keputusan dan proses selanjutnya. Dalam banyak kasus, ketika satu bagian tidak segera memberikan dokumen atau persetujuan yang diperlukan, seluruh proses akan tertunda. Oleh karena itu, penting bagi seluruh bagian di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah untuk bekerja dengan baik dalam tim, dengan memperhatikan kecepatan dan kelengkapan dalam proses pengajuan, verifikasi, dan pembayaran. Faktor ketidaklengkapan dokumen juga menjadi penghambat utama dalam proses pengujian dan pembayaran. Penyedia barang/jasa kadang tidak melengkapi dokumen

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti faktur yang tidak lengkap atau dokumen pendukung lainnya yang kurang. Keadaan ini memerlukan waktu tambahan untuk meminta dokumen yang diperlukan atau untuk melakukan klarifikasi dengan penyedia.

Hambatan lain yang sering terjadi adalah kendala dalam aplikasi keuangan yang digunakan untuk memproses data keuangan. Ketidakstabilan aplikasi atau masalah teknis yang menghambat penginputan data dapat memperlambat pengolahan pembayaran. Jika sistem aplikasi tidak mampu memproses transaksi secara efisien atau mengalami gangguan teknis, maka proses pengujian dan pembayaran akan mengalami penundaan. Dalam beberapa situasi, sistem yang bermasalah memaksa staf untuk menggunakan cara manual yang tentu saja lebih memakan waktu dan berisiko terjadi kesalahan. Selain masalah teknis, kekurangan tenaga kerja di saat-saat sibuk juga menjadi faktor penghambat. Ketika banyak tagihan yang harus diproses dalam waktu yang bersamaan, terutama pada akhir bulan atau menjelang batas waktu anggaran, terkadang ada kekurangan tenaga kerja yang dapat menghambat kelancaran proses. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua staf dapat menangani volume pekerjaan yang tinggi dalam waktu yang terbatas, sehingga beberapa bagian dari proses menjadi tertunda atau tidak segera diproses. Keterlambatan dalam verifikasi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Ketika dokumen yang masuk tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, verifikasi akan memakan waktu lebih lama. Hal ini mengharuskan PPK atau staf yang memverifikasi dokumen untuk meminta perbaikan atau klarifikasi, yang pada gilirannya akan memperlambat seluruh proses pengujian dan pembayaran. Terkadang, jika dokumen tidak segera diperbaiki, pembayaran akan terhambat atau bahkan tertunda hingga masalah selesai.

Masalah dalam pengisian dokumen atau kesalahan dalam format pengajuan pembayaran juga menjadi faktor yang memperlambat proses. Kesalahan pengisian dokumen yang tidak sesuai dengan format yang ditentukan, atau pengisian yang tidak lengkap, mengharuskan pihak yang bersangkutan untuk mengulang atau memperbaiki dokumen yang telah diajukan. Hal ini mengarah pada pemborosan waktu dan tenaga, serta mempengaruhi efisiensi proses pengujian dan pembayaran. Selain masalah administratif, ketidaksesuaian antara anggaran yang tersedia dan tagihan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa juga menjadi hambatan. Ketika ada perbedaan antara anggaran yang dialokasikan dan tagihan yang masuk, PPK atau bagian keuangan harus melakukan evaluasi ulang dan mencari solusi untuk menyesuaikan keduanya. Proses ini tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga membutuhkan koordinasi lebih lanjut antara bagian keuangan dan penyedia barang/jasa untuk menemukan solusi yang tepat. Faktor ketidakpastian regulasi atau perubahan kebijakan juga sering kali menjadi penghambat. Perubahan dalam regulasi yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan atau prosedur pembayaran dapat mempengaruhi kelancaran proses pengujian dan pembayaran. Ketika aturan atau kebijakan baru diterbitkan, staf di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah harus segera beradaptasi, yang dapat menyebabkan penundaan sementara dalam proses pengujian dan pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keterlambatan dalam penyelesaian masalah teknis di aplikasi keuangan dapat berimbas pada penundaan pembayaran yang lebih lama. Sistem aplikasi keuangan yang tidak terintegrasi dengan baik atau tidak dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses keuangan juga bisa menyebabkan hambatan. Misalnya, aplikasi yang tidak dapat memproses data dengan cepat atau yang sering mengalami downtime akan memperlambat proses verifikasi dan pembayaran.

Pemeliharaan dan perbaikan rutin terhadap sistem aplikasi keuangan menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan teknis ini. Penghambat lainnya adalah kesulitan dalam mengakses atau mencari data yang dibutuhkan dalam aplikasi keuangan. Jika sistem penyimpanan data tidak efisien atau sulit untuk diakses, pencarian dan verifikasi data akan memakan waktu lebih lama. Hal ini dapat memperlambat seluruh proses pembayaran, karena petugas harus menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencari informasi yang diperlukan untuk memverifikasi tagihan.

Faktor yang menghambat pengujian dan pembayaran adalah kurangnya pemahaman dari penyedia barang/jasa mengenai prosedur administrasi. Terkadang penyedia barang/jasa tidak sepenuhnya memahami persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan tagihan, seperti dokumen yang harus disertakan atau format yang harus dipatuhi. Ketika mereka tidak memenuhi persyaratan ini, proses verifikasi dan pembayaran menjadi lebih lama karena dokumen harus diperbaiki atau dilengkapi kembali. Penghambat utama dalam proses pengujian dan pembayaran di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah terkait dengan kelengkapan dokumen, masalah teknis aplikasi keuangan, koordinasi antar bagian yang kurang efisien, dan kekurangan tenaga kerja pada saat-saat kritis. Semua faktor ini berpotensi memperlambat proses verifikasi dan pembayaran yang seharusnya dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem administrasi, pelatihan bagi pihak terkait, dan pembenahan infrastruktur teknologi sangat diperlukan untuk memperlancar proses ini.

KESIMPULAN

1. Proses pengujian dan Pembayaran berdasarkan Perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah, meliputi: .Koordinasi yang baik antara PPK, bagian keuangan, pengadaan, dan penyedia barang/jasa akan memperlancar proses pengujian dan pembayaran, serta memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peran dan tanggung jawab PPK dalam proses proses pengujian dan Pembayaran berdasarkan Perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah adalah memastikan bahwa dokumen yang diterima sudah benar-benar sah dan tidak ada yang terlewat, memiliki pemahaman yang baik tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi tagihan, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan dalam dokumen yang diterima.
3. Faktor-faktor yang menghambat proses pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah, diantaranya kelengkapan dokumen yang belum siap saat diajukan, masalah teknis aplikasi keuangan disebabkan keterbatasan jaringan internet, koordinasi antar bagian yang kurang efisien serta kekurangan tenaga ahli khususnya bidang pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2022). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fahmi, I. (2020). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2022). *Principles of Managerial Finance* (15th ed.). Pearson.
- Hanafi, M. M. (2021). *Manajemen Keuangan*. BPFE Yogyakarta.
- Harahap, S. S. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Penerbit XYZ.
- Horne, J. C. V., & Wachowicz, J. M. (2020). *Fundamentals of Financial Management*. Pearson.

- Kasmir. (2021). *Manajemen Keuangan*. Rajawali Pers.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pengujian dan Pembayaran*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (5th ed.)*. SAGE Publications
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Santoso, A. (2020). *Dasar-Dasar Berpikir Ilmiah dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media.
- Sartono, A. (2021). *Manajemen Keuangan*. BPFE Yogyakarta.
- Sartono, A. (2022). *Manajemen Keuangan Lanjutan*. BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyono. (2021). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Penerbit XYZ.
- Weston, J. F., & Copeland, T. E. (2022). *Managerial Finance*. Pearson Education.